

SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA STABIL DI TENGAH KETIDAKPASTIAN PEREKONOMIAN GLOBAL YANG MASIH TINGGI

“Sektor jasa keuangan terjaga stabil dan kontributif terhadap pertumbuhan nasional, didukung oleh tingkat solvabilitas yang tinggi dan profil risiko yang manageable di tengah masih tingginya ketidakpastian global”

PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN



Global

- Perekonomian global secara umum menunjukkan pelemahan.
- Data perekonomian Amerika Serikat lebih rendah dari ekspektasi di tengah inflasi yang masih *sticky*.
- Perekonomian Eropa tengah menghadapi tantangan stagnasi pertumbuhan dan tekanan fiskal.
- *Decoupling demand* dan *supply* di Tiongkok masih terus berlangsung di tengah stimulus agresif yang dilakukan oleh otoritas moneter dan fiskal.

Domestik

- Inflasi inti relatif stabil dengan pertumbuhan uang beredar (M2) yang meningkat mengindikasikan potensi berlanjutnya penguatan permintaan ke depan.
- Di sisi produksi, sektor manufaktur terus mencatatkan ekspansi meskipun mengalami moderasi terlihat dari penurunan indeks PMI Manufaktur menjadi sebesar 50,7 (Mei 2024: 52,1).

PASAR MODAL

IHSG
7.063,58
Jun'24 -2,88% ytd

Jumlah Investor
13,08 Juta
Jun'24

Nilai Penghimpunan Dana
Rp
120 T
Jun'24

NAB Reksa Dana
Rp
486,45 T
Jun'24

Emiten Baru (IPO)
26
Jun'24

Securities Crowdfunding (SCF)

Juni 2024

17
penyelenggara berizin OJK

Rp **1,11** Triliun total dana yang dihimpun

548
penerbit

156.679
pemodal



Perdagangan Karbon

26 September 2023 s.d Juni 2024

Rp36,79 miliar
Akumulasi Nilai Perdagangan

608.740 tCO2e
Volume Unit



PERBANKAN

Kredit



Dana Pihak Ketiga



Kredit Investasi

14,80%
yoy
Mei'24

Kredit Modal Kerja

11,59%
yoy
Mei'24

Kredit Konsumsi

10,47%
yoy
Mei'24

CAR
26,22%
Mei'24

AL/NCD
114,58%
Mei'24

AL/DPK
25,78%
Mei'24

NIM
4,56%
Mei'24

NPL Gross
2,34%
Mei'24

RoA
2,56%
Mei'24

PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN (PPDP)

Aset Asuransi (Rp)



Aset Dana Pensiun (Rp)



Aset Perusahaan Penjaminan



RBC Asuransi Jiwa Mei'24: 441,93%

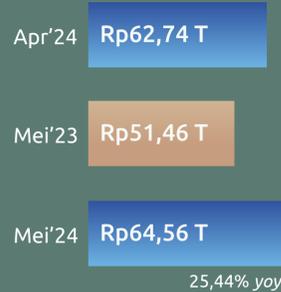
RBC Asuransi Umum dan Reasuransi Mei'24: 326,66%

LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA (PVML)

Piutang Pembiayaan



Outstanding Pembiayaan Fintech P2P Lending



Pembiayaan Modal Ventura



TWP 90 Fintech P2P Lending Mei'24: 2,91%

Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan Mei'24: 2,37x

NPF Perusahaan Pembiayaan (gross) Mei'24: 2,77%

INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO (IAKD)

Regulatory Sandbox

Pengajuan Konsultasi



Jumlah Kemitraan Penyelenggara ITSK

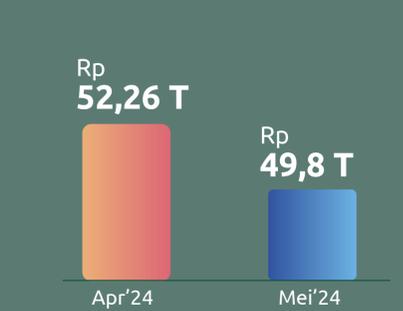


Aset Kripto

Jumlah Investor



Transaksi Kripto



PERKEMBANGAN PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)

Program literasi dan edukasi keuangan



Program Pelindungan Konsumen dan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal



Penegakan Hukum Ketentuan Pelindungan Konsumen berupa Sanksi Peringatan Tertulis, Sanksi Denda, dan Surat Perintah serta penggantian kerugian konsumen oleh PUJK.



ARAH KEBIJAKAN OJK



Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

- Di tengah tekanan pasar keuangan global yang mereda dan turunnya ekspektasi pasar terhadap kondisi *high/er for longer*, OJK tetap mencermati *downside risk* ke depan yang dapat berdampak pada sektor jasa keuangan nasional.
- Terkait risiko kredit khususnya pada segmen UMKM, berdasarkan hasil *stress test* yang telah dilakukan OJK, secara umum perbankan dinilai masih *resilient* didukung dengan permodalan yang terjaga dan tingkat pencadangan yang memadai.
- Secara umum rasio kredit yang berisiko (*Loan at risk*) untuk UMKM saat ini dalam rentang level yang terjaga dan dalam tren yang menurun, jauh di bawah level puncaknya di masa pandemi.
- Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang selaras dengan standar internasional.



Kebijakan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (SJK) dan Infrastruktur Pasar

- Melakukan penguatan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) terkait pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Lingkup Tugas OJK, yaitu memperluas cakupan PKS sebelumnya dengan menambah pemanfaatan teknologi biometrik pemindai wajah (*face recognition*).
- Meningkatkan layanan perizinan secara elektronik kepada industri agar lebih efektif dan efisien melalui pengembangan SPRINT untuk perizinan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) bagi calon pihak utama dari BPR/S serta permohonan *Regulatory Sandbox* dan pendaftaran penyelenggara ITS di OJK.
- Dalam proses finalisasi RPOJK tentang Konglomerasi Keuangan (KK) dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) sebagai penyaluran terhadap UU P2SK dan *best practice* serta perkembangan kondisi terkini.
- Dalam proses finalisasi RPOJK tentang Perintah Tertulis (Amandemen) yang dilatarbelakangi antara lain tindak lanjut dari amanat UU P2SK.
- Menyusun RPOJK Perubahan atas POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio/LCR*) bagi Bank Umum dan RPOJK Perubahan atas POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio/NSFR*) bagi Bank Umum.
- Akan menerbitkan Panduan Resiliensi Digital (*Digital Resilience*) yang dapat digunakan oleh Bank dalam mendukung proses akselerasi transformasi digital.
- Bersama Kedutaan Australia dan Prospera meningkatkan kemitraan untuk memperkuat *climate risk management* bagi industri perbankan di Indonesia sebagai tindak lanjut penerbitan Panduan *Climate Risk Management and Scenario Analysis*.
- Dalam proses penyusunan RSEOJK mengenai Produk Asuransi dan Produk Asuransi Syariah. RSEOJK akan mengatur penyempurnaan pedoman pelaporan produk asuransi yang dapat memberikan informasi yang lebih lengkap terkait dengan perencanaan, tata kelola dan mitigasi risiko oleh perusahaan dalam pemasaran produk asuransi/produk asuransi syariah.
- Dalam proses penyusunan RSEOJK Penilaian Kualitas Tagihan *Subrogasi* dan *Suretyship* oleh Perusahaan Asuransi/Syariah, Perusahaan Penjaminan/Syariah.
- Melakukan langkah-langkah persiapan pembentukan Unit Aktuaria diantaranya melalui pembentukan *task force* untuk target peluncuran di tahun 2025 dan melakukan kerja sama dengan Unit Aktuaria yang terdapat di negara lain, termasuk dengan Australian Government Actuary (AGA)
- Memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) yang dituangkan dalam RPOJK tentang Pengawasan PT SMI.
- Telah terdapat 54 PMV/S yang menyesuaikan kegiatan sesuai kategori usaha yaitu sejumlah 15 *Venture Capital Corporation (VCC)* dan 39 *Venture Debt Corporation (VDC)*
- Dalam proses finalisasi RPOJK Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan. Dengan adanya pengaturan ini, pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal ke depannya akan semakin optimal dan efektif.
- Dalam proses penyusunan RSEOJK Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Rencana Literasi dan Inklusi Keuangan, sebagai pedoman bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporan rencana dan laporan realisasi rencana kegiatan literasi dan inklusi keuangan.
- Dalam proses penyusunan RSEOJK Penilaian Sendiri Penerapan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan, sebagai pedoman bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam melakukan pelaporan Penilaian Sendiri yang wajib disampaikan setiap tahunnya.
- Menyelenggarakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan kepada para pengelola sampah di lingkungan Bantargebang bersamaan dengan pengukuhan TPAKD Kota Bekasi dan peresmian Bank Sampah.
- Menyelenggarakan Edukasi Keuangan BUNDAKU (Ibu, Anak, dan Keluarga Cakap Keuangan) di Jakarta bertema "Ibu Cerdas Keuangan, Mewujudkan Keluarga Sejahtera", yang menekankan pentingnya literasi keuangan bagi perempuan untuk mendorong kesejahteraan hidup. Sebagai penutup dilaksanakan wisuda peserta program Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS) yang diharapkan dapat menjadi Duta Literasi Keuangan Syariah.
- Melaksanakan kegiatan Sertifikasi dan *Capacity Building* kepada 70 orang perwakilan anggota TPAKD untuk memberikan pembekalan bagi anggota TPAKD dalam menyusun program kerja untuk tahun yang akan datang.
- Dalam rangka semakin meningkatkan perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap semakin meningkatnya penipuan secara *online* yang memanfaatkan layanan keuangan seperti transfer rekening bank, *virtual account*, serta *top-up* pada dompet digital (*e-wallet*), maka OJK bersama regulator, lembaga, dan pihak terkait akan membentuk *anti-scam centre* yang ditargetkan akan beroperasi dalam waktu dekat. Untuk itu saat ini tengah dilakukan penyiapan dasar hukum, sistem informasi pendukung, mekanisme kerja dan lokasi dari *anti-scam centre*.



Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

- Menggelar Indonesia *Sharia Financial Olympiad (ISFO) 2024* atau Olimpiade Nasional Keuangan Syariah bagi siswa SMA/ sederajat serta mahasiswa dari seluruh wilayah Indonesia. Agenda ini dilakukan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya pada segmen pelajar/mahasiswa secara lebih luas dan masif.
- Mengadakan Pertemuan Kelompok Kerja Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (POKJA LIKS) sebagai media komunikasi, sharing informasi dan sinergi OJK dengan *stakeholders* keuangan syariah yang menjadi anggota dari POKJA LIKS.



Inovasi Teknologi Sektor Jasa Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD)

- Telah menerbitkan SEOJK Nomor 5/SEOJK.07/2024 sebagai panduan teknis kepada calon peserta sandbox yang akan mengajukan permohonan menjadi peserta *sandbox*.
- Telah menerbitkan SEOJK Nomor 6/SEOJK.07/2024 sebagai panduan bagi Penyelenggara ITSK terkait tata cara permohonan dan persyaratan pendaftaran.
- Dalam proses penyusunan RPOJK mengenai Pemeringkat Kredit Alternatif RPOJK terkait Lembaga Agregasi Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (*Aggregator*), RSEOJK Pelaporan Penyelenggaraan ITSK, serta RSEOJK mengenai Asosiasi di Sektor ITSK, dan Pedoman Pengawasan Penyelenggara ITSK.
- Bersama *Technical Assistance* dari Cambridge *Center for Alternative Finance (CCAF)*, World Bank, dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sedang menyusun RPOJK mengenai Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan kerangka pengawasan Aset Kripto.
- Akan me-*launching* Panduan Keamanan Siber untuk Industri ITSK, sebagai pedoman bagi Penyelenggara ITSK untuk menerapkan kerangka keamanan siber di sektor ITSK.
- Akan menandatangani *Memorandum of Understanding* dengan Bank Negara Malaysia dan Monetary Authority of Singapore dalam rangka penguatan kerja sama penyusunan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan ITSK dan aset keuangan digital termasuk aset kripto.



Penguatan Tata Kelola

- Menyelenggarakan Governansi Insight Forum (In Fo) di Tasikmalaya dalam rangka memperkuat governansi dan integritas SJK.
- Mendorong implementasi *Global Internal Audit Standard (GIAS)* terbaru yang akan berlaku efektif Januari 2025 mendatang.
- Manajemen risiko di OJK terus dikuatkan dan dikinikan dengan memastikan kesesuaian dengan *framework* berstandar global ISO 31000 sehingga dihasilkan profil risiko yang handal.



Perkembangan Penyidikan

- Sampai Dengan 30 Juni 2024,
- Penyidik OJK telah menyelesaikan total 127 perkara yang terdiri dari 102 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan 20 perkara IKNB.
 - 114 perkara telah diputus oleh pengadilan (102 perkara *in kracht* dan 12 perkara tahap kasasi)



Dengan kebijakan dan langkah penegakan hukum yang dilakukan, serta senantiasa bersinergi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha, OJK optimis sektor jasa keuangan dapat terjaga stabil di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.